



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KESEPAKATAN

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN 2021



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 170/05.7s.2 /DPRD
NOMOR : 903/0368 /BPD-LIT
TANGGAL : 31 Agustus 2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. M. RIZAL EFFENDI
Jabatan : Walikota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- b. Nama : THOHARI AZIZ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- d. Nama : SUBARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Balikpapan, 31 Agustus 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN

selaku,
PIHAK PERTAMA



H.M. RIZAL EFFENDI

**PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK KEDUA**



**ABDULLOH
Ketua**

**THOHARI AZIZ
Wakil Ketua**



**SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua**



**SUBARI
Wakil Ketua**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Balikpapan, 31 Agustus 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN

selaku,
PIHAK PERTAMA









H.M. RIZAL EFFENDI

**PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA



ABDULLOH
Ketua

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	<u>Sayid MN Fadli</u>	<u>Sekretaris Daerah</u>	
2.	<u>Syaiful Bahri</u>	<u>Asisten Tapem</u>	
3.	M. Noor	<u>Asisten Ekbangkesra</u>	
4.	<u>Dahniar</u>	<u>Asisten Adm. Umum</u>	
5.	<u>Tirta Dewi</u>	<u>Inspektur Inspektorat</u>	
6.	<u>Agus Budi Prasetyo</u>	<u>Ka. Bappeda Litbang</u>	
7.	<u>Madram Muchyar</u>	<u>Ka. BPKD</u>	
8.	<u>Freddy O. Nelwan</u>	<u>Kabag. Adm. Pembangunan</u>	
9.	<u>Arif Dwiyanto</u>	<u>Kabag. PBJ</u>	

THOHARI AZIZ
Wakil Ketua



SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua



SUBARI
Wakil Ketua

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Selanjutnya proses perencanaan ini diikuti dengan penetapan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan menjadi KUA dan PPAS. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Dengan demikian, Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan, dalam hal ini RKPD Tahun 2020. Dan selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2021.

Dengan demikian, Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan, dalam hal ini RKPD Tahun 2021. Dan selanjutnya

KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun 2021.

Dokumen KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan belanja yang tertuang dalam KUA Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021, dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan pada tahun 2021, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap proporsi pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat dan pemerintah, pendapatan pemerintah, yang akumulasinya berdampak terhadap pembangunan kota secara keseluruhan. KUA TA 2021 ini menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Kota Balikpapan TA 2021 dan penyusunan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya KUA TA 2021 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dalam periode tahun 2021.

Kebijakan pembangunan tersebut meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya sebagai landasan penyusunan PPAS serta RAPBD TA 2021.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUA Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang terkait dibidang perencanaan dan keuangan, yang secara umum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

BAB II

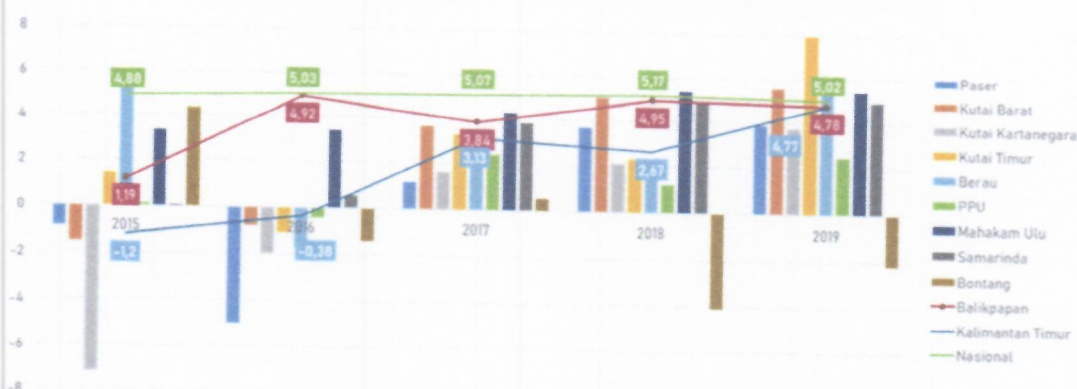
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

2.1. Kinerja Makro Ekonomi

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp 95,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2018 mencapai Rp 79,79 triliun, sehingga ekonomi Kota Balikpapan tahun 2018 tumbuh sebesar 4,97% dan tumbuh sebesar 4,78% pada tahun 2019, dan diproyeksi akan tumbuh sebesar 5,3-5,7% di tahun 2020.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan



Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,85%. Struktur Ekonomi Kota Balikpapan didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha, yakni Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 46,04%, Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 15,84%, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peranan sebesar 12,48%, dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 8,95%.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini tergambar Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Balikpapan pada tahun 2015-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,19	4,92	3,81	4,97	4,78	5,3-5,7

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2019 (*) proyeksi Bank Indonesia Tahun 2019

2.1.2. Inflasi

Dalam waktu 5 tahun terakhir, angka inflasi Kota Balikpapan semakin menunjukkan pergerakan yang lebih stabil. Inflasi Kota Balikpapan lebih rendah

dibandingkan dengan inflasi nasional pada level 2,72%, tetapi lebih tinggi sebesar 0,22% dibandingkan nilai inflasi provinsi kaltim.

Gambar 2. Inflasi Kota Balikpapan



Tabel 2. Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Balikpapan Tahun 2014-2019

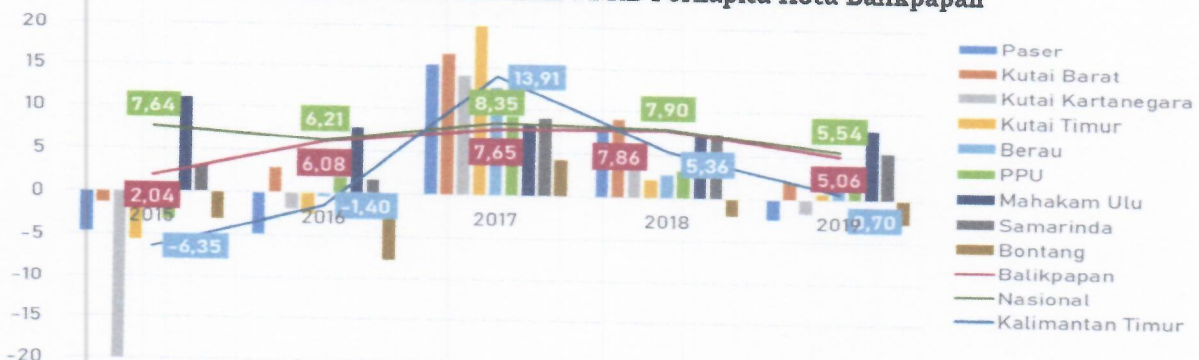
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi Kota Balikpapan	7.43	6.26	4.13	2.45	3,13	1,88
Inflasi Provinsi Kaltim	7.66	4.89	3.39	3.15	3,24	1,66
Inflasi Nasional	8.36	3.35	3.02	3.61	3,13	2,72

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2020.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Balikpapan cenderung stabil jika dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan mendekati pertumbuhan Nasional

Gambar 3. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Balikpapan



Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (000.000 Rp) Tahun 2015 - 2019

NO	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	766.478,7	786.498,8	805.009,2	892.288,8	978.609,40
2	Pertambangan dan Penggalian	38.929,4	40.216,8	41.391,4	42.390,5	43.863,51
3	Industri pengolahan	35.505.746,0	38.123.497,4	40.425.309,8	43.814.515,6	47.018.512,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	60.033,5	69.093,5	77.940,6	82.681,7	91.957,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59.431,9	63.199,8	72.812,1	76.626,3	82.261,96
6	Konstruksi	11.479.667,8	11.995.591,8	13.423.205,0	15.074.614,3	16.427.567,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Repasari Mobil dan Sepeda Motor	6.535.302,6	7.081.330,4	7.705.685,2	8.519.410,5	9.547.776,59

NO	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
8	Transportasi dan Pergudangan	8.399.034,4	9.582.653,3	10.965.793,2	11.875.286,9	12.239.294,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.280.975,2	1.418.792,0	1.605.052,9	1.835.785,7	2.031.892,78
10	Informasi dan Komunikasi	2.413.149,4	2.560.590,3	2.853.185,3	3.091.565,8	3.383.138,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.978.487,7	3.145.931,5	3.302.522,7	3.605.995,6	3.803.001,03
12	Real Estate	1.477.004,0	1.619.545,3	1.801.336,2	1.958.732,3	2.028.385,44
13	Jasa Perusahaan	259.387,3	254.897,5	276.232,4	294.795,4	304.513,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.023.244,4	1.086.868,5	1.005.147,2	1.100.240,5	1.192.622,52
15	Jasa Pendidikan	1.098.962,5	1.239.650,5	1.364.004,5	1.503.409,0	1.653.624,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449.703,1	521.696,3	567.235,8	616.432,2	661.526,33
17	Jasa Lainnya	520.900,5	611.865,9	697.099,3	777.291,4	900.486,67
PDRB		71.622.701,0	80.201.919,7	86.988.963,0	95.162.062,4	102.389.034,05

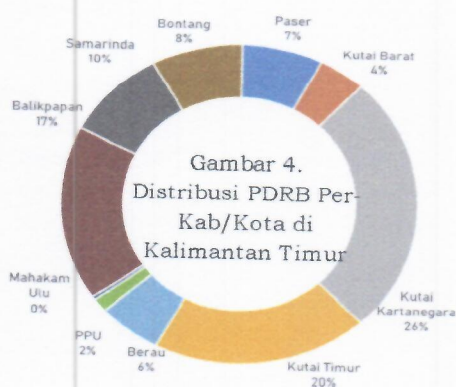
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2019

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 102.389.034,05 juta, secara nominal meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan, yakni sebesar 45,92%; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB Kota Balikpapan tahun 2019.

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (000.000 Rp) Tahun 2015-2019

No.	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	696.367,85	700.989,75	693.061,54	746.262,47	782.014,55
2	Pertambangan & Penggalian	34.597,95	35.052,10	35.262,92	35.529,86	35.934,21
3	Industri pengolahan	39.638.062,19	42.157.062,34	43.657.280,78	45.442.815,10	47.472.116,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	60.216,59	66.074,72	66.169,71	69.496,29	76.027,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.169,87	50.085,98	54.639,53	55.725,57	58.994,44
6	Konstruksi	8.650.531,82	8.665.558,76	8.943.483,43	9.510.131,46	10.176.792,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Repasari Mobil dan Sepeda Motor	5.670.841,55	5.848.553,56	6.155.721,31	6.551.791,70	6.936.740,64
8	Transportasi dan Pergudangan	5.317.441,63	5.618.657,51	5.978.044,83	6.283.541,97	6.337.254,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	957.062,09	1.018.543,64	1.108.885,61	1.240.300,35	1.343.770,79
10	Informasi dan Komunikasi	2.335.662,49	2.449.620,40	2.644.528,85	2.780.444,93	3.004.061,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.358.566,53	2.399.325,61	2.394.776,19	2.517.790,53	2.612.608,15
12	Real Estate	1.196.466,16	1.261.177,47	1.321.553,37	1.382.661,68	1.410.669,50
13	Jasa Perusahaan	200.441,55	192.714,75	198.591,38	205.647,74	207.752,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	980.787,91	995.910,71	894.679,33	940.397,44	1.000.206,72
15	Jasa Pendidikan	878.590,77	942.006,30	1.008.511,95	1.087.881,84	1.137.683,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	332.661,94	361.390,33	385.003,42	409.277,58	431.695,63
17	Jasa Lainnya	427.275,83	458.738,15	491.884,98	534.098,89	580.565,49
PDRB		69.785.744,72	73.221.462,08	76.032.079,13	79.793.795,40	83.604.887,62

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2020

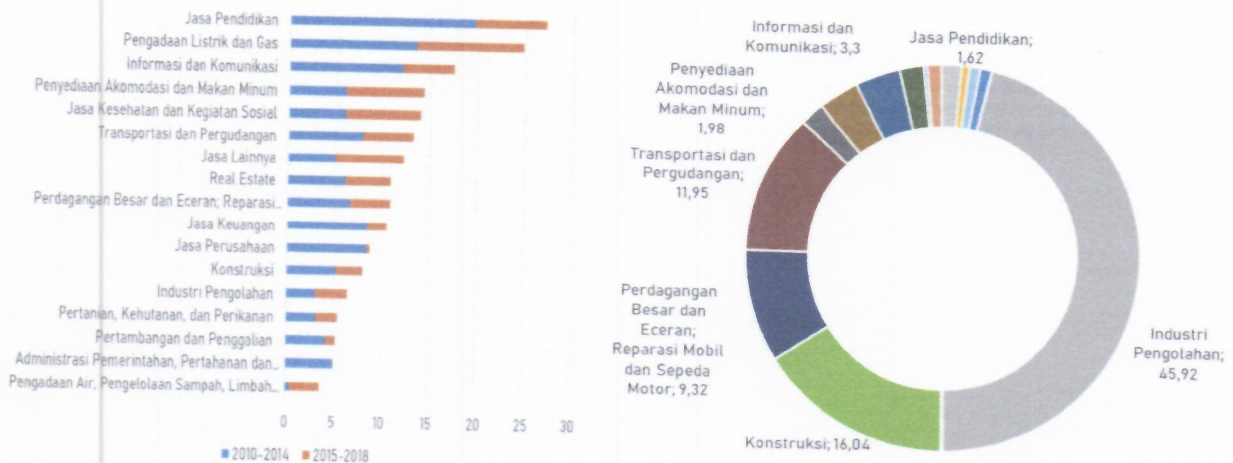


Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 79.786.081,6 juta, meningkat pula bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota Balikpapan berkontribusi 17% kepada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (2019), terbesar ketiga setelah Kutai Kertanegara (26%) dan Kutai Timur (20%).

Menurut Pertumbuhan PDRB menurut sector di Kota Balikpapan, Sektor Jasa Pendidikan dan Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi, namun pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap percepatan pertumbuhan PDRB, PDRB Balikpapan didominasi oleh Industri Pengolahan 45,92%, diikuti Konstruksi 16,04%; Transportasi 11,95% dan Perdagangan 9,32%

Gambar 5. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Sektor di Kota Balikpapan



2.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengedepankan kebijakan untuk tidak membebani masyarakat.

Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun

2021 merupakan masa pemulihan ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi nasional dan daerah sehingga proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terkontraksi pada Rp. 715.000.000.000,00 namun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, dilakukan *Refocusing* Anggaran menjadi Rp. 389.486.885.000,00 dan diproyeksi dapat pulih kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.606.369.800.800,00.

Tabel 5. Realisasi dan Target pendapatan Tahun 2020 dan 2021

URAIAN (PP NO. 12/2019)	TARGET		
	2020		2021
	APBD Murni	APBD (Refocusing COVID)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	715.000.000.000,00	389.468.885.000,00	606.369.800.800,00
Pajak Daerah	515.294.428.600,00	257.647.214.300,00	442.690.000.000,00
Retribusi Daerah	65.182.725.400,00	32.794.869.900,00	63.503.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.625.000.000,00	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.897.846.000,00	82.626.800.800,00	83.776.800.800,00

Sumber : BPKD Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel 5 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Target Hasil Pajak Daerah tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 257.647.214.300,00. Pada tahun 2021 Pajak Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 442.690.000.000,00 atau Peningkatan kurang lebih sekitar 72%.
- Target Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 32.794.869.900,00. Pada tahun 2021 Retribusi Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 63.503.000.000,00 atau Peningkatan kurang lebih sekitar 94%.
- Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 16.400.000.000,00. Pada tahun 2021 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.400.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan target.
- Target Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 82.626.800.800,00. Pada tahun 2021 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 83.776.800.800,00 atau Peningkatan kurang lebih sekitar 1%.

2.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang dimaksud adalah Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan yang diperoleh atau ditransfer antar daerah. Komponen dari Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah pusat dan transfer antar Daerah, Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang

terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana bagi hasil dan DAU), Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana keistimewaaan dan Dana Desa, sedangkan Transfer antar Daerah berupa Pendapatan Bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

Penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan pada APBD Refocusing Covid-19 adalah sebesar Rp. 1.401.529.679.000,00 dengan Proyeksi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.369.305.568.260,00 ditargetkan mengalami penurunan sekitar 2%. Adapun perincian penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 dan Proyeksi Target pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perincian Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Balikpapan

URAIAN (PP NO. 12/2019)	TARGET		
	2020		2021
	APBD Murni	APBD (Refocusing COVID)	
PENDAPATAN TRANSFER	1.741.948.804.400,00	1.401.529.679.000,00	1.369.305.568.260,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.319.651.918.400,00	1.226.278.642.000,00	1.115.460.059.460,00
<i>Dana Perimbangan</i>	<i>1.262.056.302.400,00</i>	<i>1.165.648.100.000,00</i>	<i>1.058.460.059.460,00</i>
Dana Transfer Umum	1.091.833.744.400,00	1.022.689.658.000,00	986.412.084.460,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	609.650.329.400,00	584.962.870.000,00	548.685.296.460,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	482.183.415.000,00	437.726.788.000,00	437.726.788.000,00
Dana Transfer Khusus	170.222.558.000,00	142.958.442.000,00	72.047.975.000,00
Dana Insentif Daerah	57.595.616.000,00	60.630.542.000,00	57.000.000.000,00
Transfer Antar-Daerah	422.296.886.000,00	175.251.037.000,00	253.845.508.800,00
<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>317.306.886.000,00</i>	<i>122.756.037.000,00</i>	<i>253.845.508.800,00</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	317.306.886.000,00	122.756.037.000,00	253.845.508.800,00
Bantuan Keuangan	104.990.000.000,00	52.495.000.000,00	

Sumber : BPKD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel 6 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Transfer Pemerintah pusat pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 1.226.278.642.000,00, Pada Tahun 2021 ditargetkan Rp. 1.115.460.059.460,00 sehingga mengalami Penurunan sekitar 9% dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Target Dana Perimbangan pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 1.165.684.100.000,00, Pada Tahun 2021 ditargetkan Rp. 1.058.460.059.460,00 sehingga mengalami Penurunan sekitar 9% dengan rincian sebagai berikut :
 - Target Dana Transfer Umum pada tahun 2020 yang setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 1.022.689.658.000,00, pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 4% atau sebesar Rp.986.412.084.460,00 dengan rincian :
 - Target Dana Bagi hasil (DBH) pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 584.962.870.000,00. Pada tahun 2021 Dana Bagi hasil (DBH) ditargetkan mengalami Penurunan kurang lebih sekitar 6% atau menjadi sebesar Rp. 548.685.296.460,00.

- Target Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 437.726.788.000,00. Pada tahun 2021 Dana Alokasi Umum (DAU ditargetkan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 437.726.788.000,00.
 - Target Dana Transfer Khusus pada tahun 2020 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 142.958.442.000,00, pada tahun 2021 mengalami Penurunan menjadi sebesar Rp. 72.047.975.000,00 atau kurang lebih sekitar 50%.
- b. Pada tahun 2020 Target Dana Insentif Daerah setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 60.630.542.000,00, pada tahun 2021 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 57.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sekitar 6%.
2. Transfer Antar Daerah pada tahun 2020 setelah mengalami pandemi covid-19 ditargetkan sebesar Rp. 175.251.037.000,00, pada tahun 2021 ditargetkan mengalami peningkatan sekitar 45% atau sebesar Rp. 253.845.508.800,00 yang diperoleh dari :
- a. Target Pendapatan bagi hasil Pajak yang pada tahun 2020 setelah mengalami pandemi covid-19 menjadi sebesar Rp. 122.756.037.000,00 pada tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar Rp. 253.845.508.800,00 atau sekitar 107%.
- b. Bantuan Keuangan pada Tahun 2020 setelah mengalami pandemi covid-19 menjadi sebesar Rp. 52.495.000.000,00, pada tahun 2021 belum ditargetkan karena masih menunggu konfirmasi dari kementerian terkait.

2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah (2) Dana Darurat dan (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2020 setelah mengalami pandemi covid-19 ditargetkan sebesar Rp. 77.971.300.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Rp.77.971.300.000,00, Pada tahun 2021 target Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dan dengan catatan Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan target belum diproyeksikan.

Tabel 7. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

NO	URAIAN (PP NO. 12/2019)	TARGET		
		2020		2021
		APBD Murni	APBD (Refocusing COVID)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.971.300.000,00	77.971.300.000,00	10.000.000.000,00
	Hibah	77.971.300.000,00	77.971.300.000,00	10.000.000.000,00

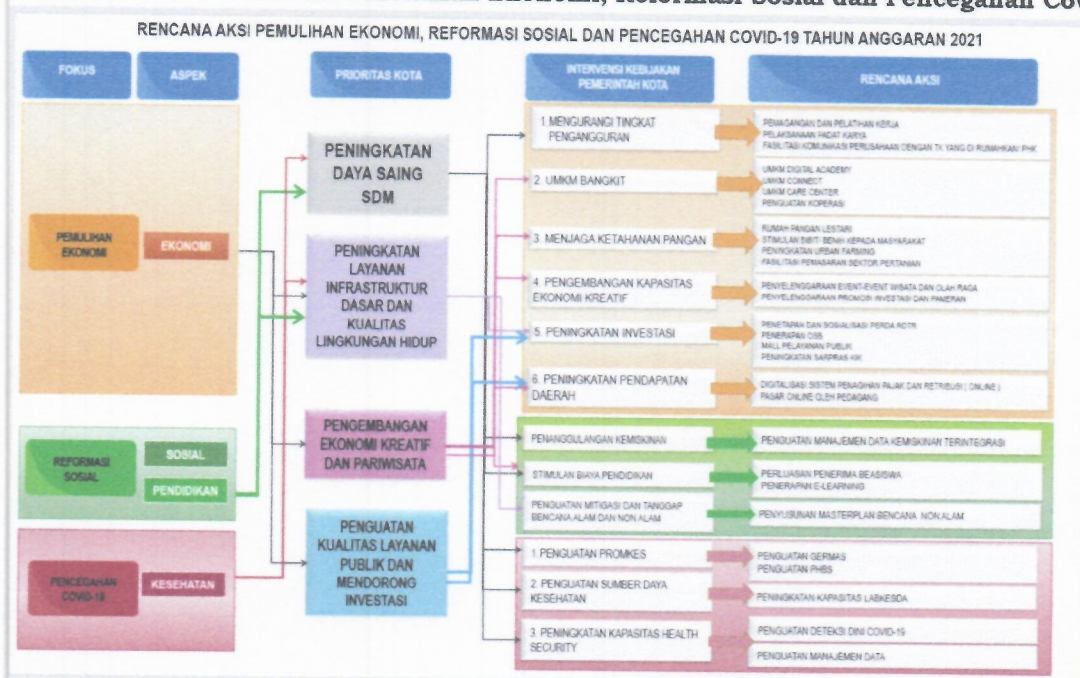
Sumber : BPKD Kota Balikpapan

2.3 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota yang mengalami dampak terparah pandemi Covid-19 untuk wilayah regional pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini membuat Pemerintah Kota Balikpapan perlu untuk melakukan penyesuaian Kembali tema pembangunan pada RKPD 2021. Tema RKPD 2021 yang awalnya “PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG BERKELANJUTAN” disesuaikan menjadi “PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN YANG MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”.

Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka memberikan intervensi dan penekanan pada prioritas-prioritas pembangunan dalam rangka memulihkan kembali kondisi perekonomian Kota Balikpapan yang mengalami perlambatan selama pandemi Covid-19. Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, reformasi sosial dan pencegahan Covid-19 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun rencana aksi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021

Gambar 2.5. Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial dan Pencegahan Covid-19

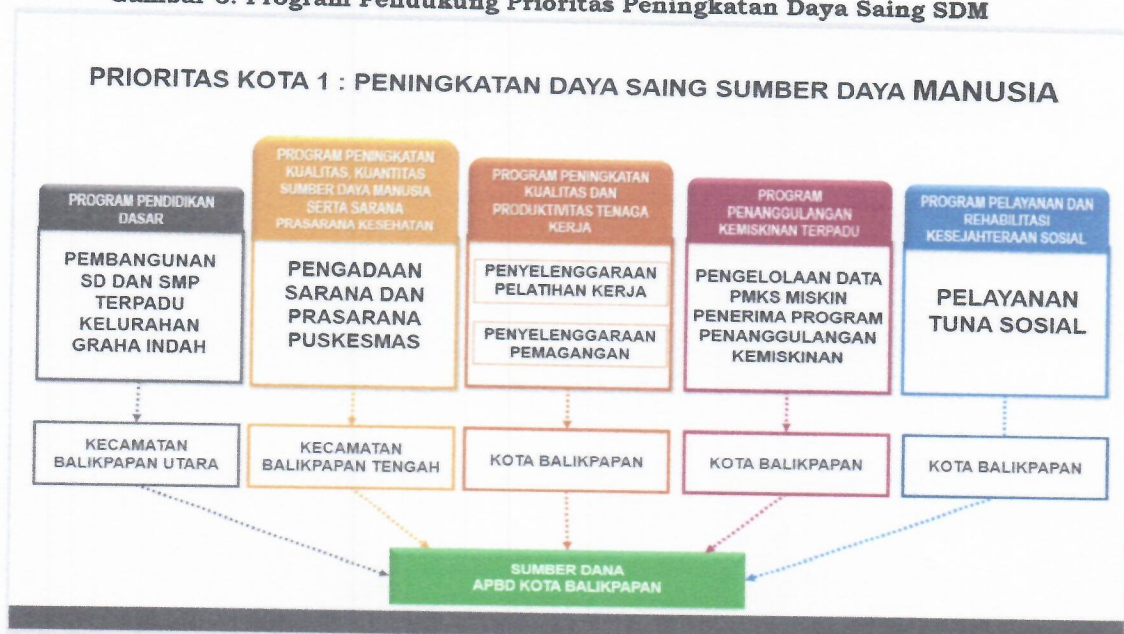


Tema pembangunan tahun 2021 ini dijabarkan menjadi 4 (empat) fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Balikpapan agar memiliki suatu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki keunggulan ataupun kemampuan baik dari segi komparatif maupun kompetitif. Peningkatan sumber daya manusia tersebut meliputi seluruh seluruh bidang yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan serta sosial budaya. Dalam rangka pencapaian fokus Peningkatan sumber daya manusia berdaya saing tersebut, maka program-program prioritas Kota Balikpapan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Program Pendukung Prioritas Peningkatan Daya Saing SDM



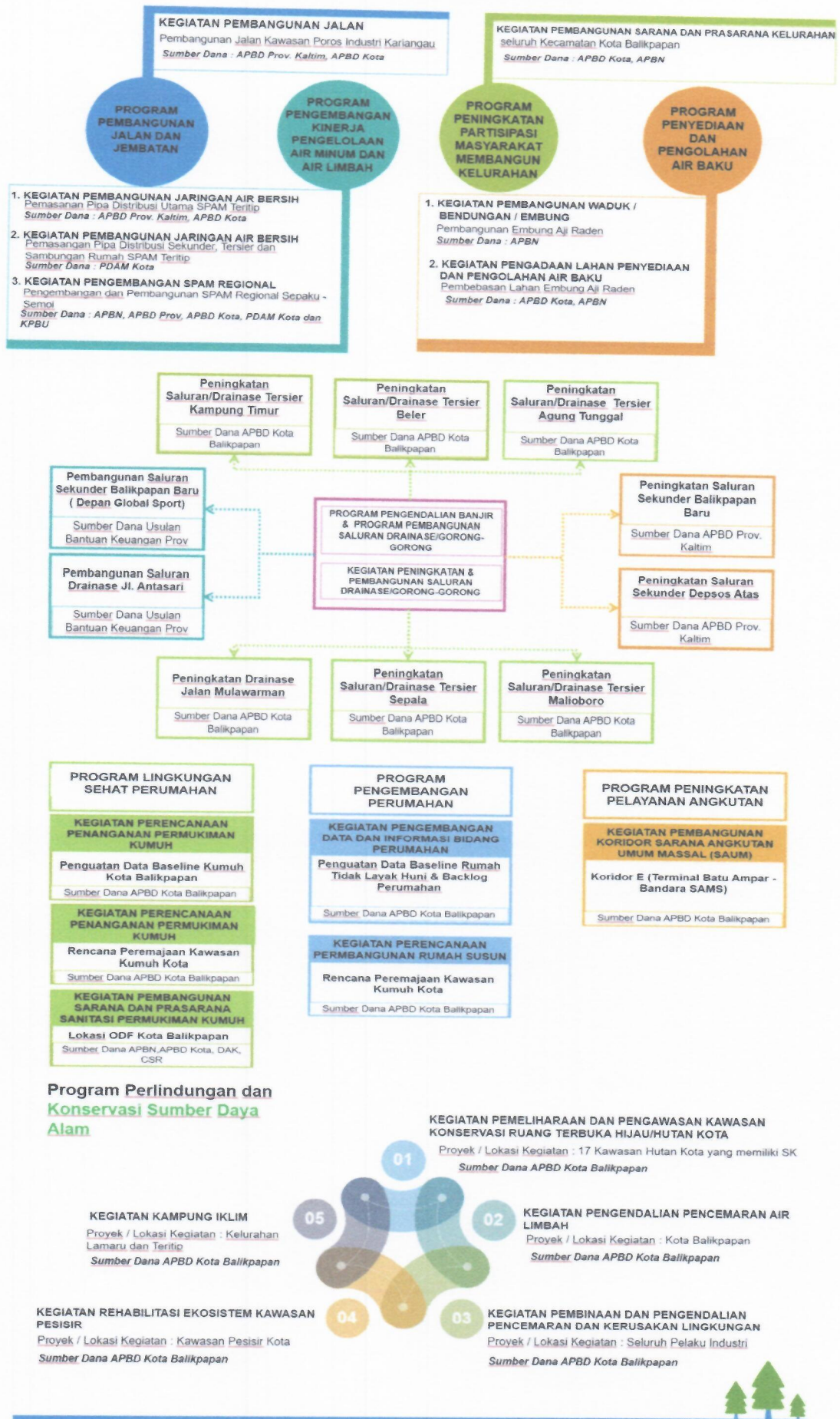
2. Peningkatan layanan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup

Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup sejalan dengan prioritas nasional kedua (PN 2) untuk melakukan pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, prioritas nasional kelima (PN 5) untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta prioritas nasional keenam (PN 6) untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan dan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan visi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan Kota Layak Huni, Terkemuka dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman.

Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup tahun 2021 diarahkan untuk upaya pengendalian banjir, mendukung kegiatan percepatan transformasi sosial ekonomi terutama pada sektor riil yaitu industri, pariwisata dan investasi dalam rangka pemulihan dampak Covid-19. Selain itu juga diarahkan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Segala upaya yang dilaksanakan pada kerangka mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota berkelanjutan yang berketahanan bencana dan iklim yaitu upaya untuk menciptakan kemampuan lingkungan perkotaan agar dapat mempersiapkan, menanggapi, melawan dan memulihkan diri dari ancaman bahaya yang signifikan dengan kerusakan minimum untuk keselamatan publik, kesehatan, keamanan dan ekonomi dalam waktu yang tepat dan efisien. Oleh karena itu, program prioritas untuk mendukung capaian fokus pembangunan ini adalah :

Gambar 7. Program Pendukung Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup

PRIORITAS KOTA 2 : PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Balikpapan akan berbenah dalam pemulihan ekonomi kota pada sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum melalui penguatan pelaksanaan aktivitas MICE. Event yang akan diadakan baik dari kegiatan olah raga maupun pariwisata. Dengan berbagai event yang akan diadakan di Kota Balikpapan diharapkan sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum akan kembali bergeliat dan khususnya pekerja perhotelan yang dirumahkan dapat bekerja kembali. Selain di sektor Pariwisata, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui program UMKM Bangkit yang telah dirintis sejak Covid-19 melanda Kota Balikpapan yang berimbas kepada sebagian pelaku UMKM. Diharapkan program-program yang telah dicanangkan dapat dilanjutkan pada tahun 2021 agar pelaku UMKM terus bergeliat maju. Selain itu, gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia” yang telah dicanangkan Presiden RI pada 14 Mei 2020 akan terus digaungkan sebagai wujud dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Mesin ketiga” yang dapat digerakkan adalah kaum milenial yang cukup adaptif terhadap kemajuan teknologi. Sehingga pelatihan-pelatihan pada Program Pengembangan industri kecil menengah yang akan dilakukan pada tahun 2021 diutamakan akan menyasar ibu rumah tangga dan kaum milenial. Oleh karena itu, untuk program prioritas untuk mendukung fokus pembangunan ini adalah :

Gambar 8. Program Pendukung Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
PRIORITAS KOTA 3 : PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA



4. Penguatan kualitas layanan publik dan mendorong investasi

Dalam rangka meningkatkan minat investasi di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK) dan mendorong percepatan pembangunan *coastal road* diperlukan langkah-langkah konkrit mendorong investasi di Kota Balikpapan dengan Penyelenggaraan Promosi Investasi dengan target pertumbuhan penanaman modal asing maupun dalam negeri dalam kisaran 15%. Dengan lokasi utama mengikuti kegiatan *Infrastructure Weeks* yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dan dihadiri investor PMA maupun PMDN atau kegiatan *Regional Investment Forum* yang rutin diadakan oleh BKPM. Selain itu, melalui Kegiatan

Penanaman Modal Dalam Angka yang memberikan gambaran secara riil bagi investor mengenai peluang investasi di Kota Balikpapan baik dalam bentuk video profil investasi maupun dalam bentuk info grafis pada website DPMPT Kota Balikpapan. Oleh karena itu, untuk program prioritas untuk mendukung fokus pembangunan ini adalah:

Gambar 9. Program Pendukung Penguatan Kualitas Layanan Publik dan Mendorong Investasi

PRIORITAS KOTA 4 : Penguatan Kualitas Layanan Publik dan Mendorong Investasi



Tabel 8. Keterkaitan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Sasaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
	Menurunnya Jumlah Pengangguran
	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Peningkatan layanan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Penguatan kualitas layanan publik dan mendorong investasi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Perumusan sebuah kebijakan publik diawali dengan identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) dan isu-isu strategis daerah. Analisis permasalahan daerah dilakukan guna menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang sedang terjadi dengan Munculnya kasus penyebaran virus corona menambah risiko ketidakpastian perekonomian global 2020 yang masih menghadapi isu geo-ekonomi-politik yang memungkinkan akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran

RPJMN 2020-2024. Memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi dan mengejar target RPJMN 2020-2024. Hal-hal semacam ini harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang yang harus dimanfaatkan dan ancaman yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 mengakibatkan penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang secara langsung berakibat melambatnya pertumbuhan perekonomian baik skala nasional maupun regional. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian tema RKP 2021 dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya-upaya mempercepat pemulihan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat sebagai akibat pandemi Covid-19. Tema RKPD 2021 yang awalnya "MENINGKATKAN INDUSTRI, PARIWISATA DAN INVESTASI DI BERBAGAI WILAYAH DIDUKUNG OLEH SDM, DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS" disesuaikan menjadi "MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL".

Berdasarkan tema tersebut, maka RKP 2021 akan difokuskan pada :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan nasional;
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial;
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Fokus tersebut dilakukan dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021. Agenda pembangunan tahun 2021 yang merupakan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan tahun lanjutan kedua dari perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang diarahkan Tema/fokus Pembangunan **“MENUMBUHKAN INDUSTRI HILIR YANG MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI KAWASAN”**, yang dijabarkan dalam enam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
4. Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang;
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.

Integrasi Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

Mengingat dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2021 perlu dilakukan harmonisasi prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur yang sinergis dengan pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas tersebut dilakukan mulai dari pemahaman keterkaitan fokus pembangunan dan persandingan target indikator pembangunan yang kemudian menjadi acuan pendekatan pembangunan daerah.

Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Balikpapan

No	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kota
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	< 74,54	< 76,61	< 79,53
2	Tingkat Kemiskinan	6,0-7,0 %	5,87-5,78 %	2,3%
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,7-6,0 %	3,5 ± 1%	5,0-5,5%
4	Gini Ratio	0,360-0,374	0,328-0,327	0,30
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6-4,3 %	6-5 %	4,55%

**Tabel 10 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota
Balikpapan**

z	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
1	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.					
		DKUMKMP				
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		77.485.850		77.485.850
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		155.000.000		155.000.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)		317.100.000		317.100.000
		Program Pengembangan Ukm		116.400.000		116.400.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		8.043.500.000		8.043.500.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		80.000.000		80.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		200.000.000		200.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		398.514.150		398.514.150
		DPMPT				
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		250.000.000		250.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal		300.000.000		300.000.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal		592.000.000		592.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		210.000.000		210.000.000
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		843.400.000		843.400.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		821.100.000		821.100.000
		BPPDRD				
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.419.586.270		6.419.586.270
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		717.408.000		717.408.000
		BPKD				
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		5.258.000.000		5.258.000.000
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		16.350.000.000		16.350.000.000
		DISDAG				
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		10.215.500.000		10.215.500.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		100.000.000		100.000.000
		Program Pengembangan Ekspor		475.000.000		475.000.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		550.000.000		550.000.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		100.000.000		100.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		390.200.000		390.200.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		1.000.000.000		1.000.000.000
		DPOP				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		2.795.000.000		2.795.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		8.454.428.000		8.454.428.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		6.100.000.000		6.100.000.000
		Program Pemasaran Pariwisata		2.580.000.000		2.580.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		480.000.000		480.000.000
		DP3				
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		245.000.000		245.000.000

z	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		75.000.000		75.000.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan		100.000.000		100.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		422.500.000		422.500.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		537.500.000		537.500.000
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1.280.000.000		1.280.000.000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100.000.000		100.000.000
		Program Penyuluhan Pertanian		425.000.000		425.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah		1.490.600.000		1.490.600.000
		Program Penyuluhan Pertanian		160.800.000		160.800.000
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.					
		DINSOS				
		Program Rehabilitasi Sosial		1.188.859.688		1.188.859.688
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		1.546.940.000		1.546.940.000
		Program Pemberdayaan Sosial		753.000.000		753.000.000
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		169.075.000		169.075.000
		Program Penanganan Bencana		556.670.000		556.670.000
		DP3AKB				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		764.152.000		764.152.000
		Program Pengendalian Penduduk		180.000.000		180.000.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		334.097.000		334.097.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		550.000.000		550.000.000
		Program Perlindungan Khusus Anak		235.000.000		235.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		229.298.000		229.298.000
		Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak		243.147.000		243.147.000
		Program Perlindungan Khusus Anak		600.000.000		600.000.000
		Program Perlindungan Perempuan		421.442.000		421.442.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		220.000.000		220.000.000
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		225.000.000		225.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Gender Dan Anak		50.000.000		50.000.000
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
		DISDIKBUD				
		Program Pengelolaan Pendidikan		192.177.160.860		192.177.160.860
		Program Pengembangan Kurikulum		1.073.500.000		1.073.500.000
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		2.176.750.000		2.176.750.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		1.444.695.000		1.444.695.000
		DINKES				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		111.181.760.000		111.181.760.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.070.000.000		1.070.000.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		300.000.000		300.000.000
		DISPUTAKAR				
		Program Pembinaan Perpustakaan		1.321.703.150		1.321.703.150
		Program Pengelolaan Arsip		650.000.000		650.000.000
		DISDUKCAPIL				
		Program Pendaftaran Penduduk		447.750.000		447.750.000

z	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
		Program Pencatatan Sipil		421.441.000		421.441.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1.020.979.000		1.020.979.000
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
		DISDIKBUD				
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		1.475.000.000		1.475.000.000
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
		DPU				
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		4.300.000.000		4.300.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		15.500.000.000		15.500.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		73.502.800.000		73.502.800.000
		Program Pengembangan Permukiman		51.330.000.000		51.330.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung		14.815.000.000		14.815.000.000
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		17.100.000.000		17.100.000.000
		Program Penyelenggaraan Jalan		31.522.000.000		31.522.000.000
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		250.000.000		250.000.000
		DISPERKIM				
		Program Pengembangan Perumahan		4.285.000.000		4.285.000.000
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh		6.325.000.000		6.325.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		22.554.590.590		22.554.590.590
		DISHUB				
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		46.883.000.000		46.883.000.000
		Program Pengelolaan Pelayaran		290.000.000		290.000.000
		DISKOMINFO				
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik		2.025.400.000		2.025.400.000
		Program Aplikasi Informatika		4.202.300.000		4.202.300.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		50.000.000		50.000.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		50.000.000		50.000.000
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					
		DLH				
		Program Pengelolaan Persampahan		49.500.574.500		49.500.574.500
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		2.000.000.000		2.000.000.000
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.500.000.000		1.500.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1600000000		1.600.000.000
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		52.000.000		52.000.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		79.000.000		79.000.000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		200.000.000		200.000.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		798.925.000		798.925.000
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		300.000.000		300.000.000
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		4.920.000.000		4.920.000.000

z	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		468.000.000		468.000.000
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		50.000.000		50.000.000
		DPPR				
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.660.000.000		1.660.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung		208.000.000		208.000.000
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		156.000.000		156.000.000
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		291.200.000		291.200.000
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		40.000.000		40.000.000
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		28.579.700.000		28.579.700.000
		Program Penyelenggaraan Jalan		5.000.000.000		5.000.000.000
		BPBD				
		Program Penanggulangan Bencana		7.685.000.000		7.685.000.000
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.					
		SATPOL PP				
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.367.000.000		3.367.000.000
		KESBANPOL				
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		25.000.000		25.000.000
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		615.000.000		615.000.000
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		100.000.000		100.000.000
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		155.000.000		155.000.000
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		400.000.000		400.000.000
		SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		24.017.976.782		24.017.976.782
		Perekonomian Dan Pembangunan		2.623.596.500		2.623.596.500
		Program Administrasi Umum		27.174.244.000		27.174.244.000

Tabel 11 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan

No	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
1		Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja				
		DISDIKBUD				
		Program Pengelolaan Pendidikan		192.177.160.860		192.177.160.860
		Program Pengembangan Kurikulum		1.073.500.000		1.073.500.000
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		2.176.750.000		2.176.750.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		1.444.695.000		1.444.695.000
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		1.475.000.000		1.475.000.000
		DINKES				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		111.181.760.000		111.181.760.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.070.000.000		1.070.000.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		300.000.000		300.000.000
		DISPUTAKAR				
		Program Pembinaan Perpustakaan		1.321.703.150		1.321.703.150
		Program Pengelolaan Arsip		650.000.000		650.000.000
		DISDUKCAPIL				
		Program Pendaftaran Penduduk		447.750.000		447.750.000
		Program Pencatatan Sipil		421.441.000		421.441.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1020979000		1.020.979.000
		DP3AKB				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		764.152.000		764.152.000
		Program Pengendalian Penduduk		180.000.000		180.000.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		334.097.000		334.097.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		550.000.000		550.000.000
		Program Perlindungan Khusus Anak		235.000.000		235.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		229.298.000		229.298.000
		Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak		243.147.000		243.147.000
		Program Perlindungan Khusus Anak		600.000.000		600.000.000
		Program Perlindungan Perempuan		421.442.000		421.442.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		220.000.000		220.000.000
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan		225.000.000		225.000.000

No	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
		Pemberdayaan Perempuan				225.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Gender Dan Anak		50.000.000		50.000.000
2		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;				
		DKUMKMP				
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		77.485.850		77.485.850
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		155.000.000		155.000.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)		317.100.000		317.100.000
		Program Pengembangan Umkm		116.400.000		116.400.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		8.043.500.000		8.043.500.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		80.000.000		80.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		200.000.000		200.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		398.514.150		398.514.150
		DISDAG				
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		10.215.500.000		10.215.500.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		100.000.000		100.000.000
		Program Pengembangan Ekspor		475.000.000		475.000.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		550.000.000		550.000.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		100.000.000		100.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		390.200.000		390.200.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		1.000.000.000		1.000.000.000
		DP3				
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		245.000.000		245.000.000
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		75.000.000		75.000.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan		100.000.000		100.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		422.500.000		422.500.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		537.500.000		537.500.000
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1.280.000.000		1.280.000.000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100.000.000		100.000.000
		Program Penyuluhan Pertanian		425.000.000		425.000.000

No	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah		1.490.600.000		1.490.600.000
		Program Penyuluhan Pertanian		160.800.000		160.800.000
3		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi				
		DPMPT				
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		250.000.000		250.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal		300.000.000		300.000.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal		592.000.000		592.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		210.000.000		210.000.000
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		843.400.000		843.400.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		821.100.000		821.100.000
		BPPDRD				
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.419.586.270		6.419.586.270
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		717.408.000		717.408.000
		BPKD				
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		5.258.000.000		5.258.000.000
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		16.350.000.000		16.350.000.000
4		Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;				
		DPU				
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		4.300.000.000		4.300.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		15.500.000.000		15.500.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		73.502.800.000		73.502.800.000
		Program Pengembangan Permukiman		51.330.000.000		51.330.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung		14.815.000.000		14.815.000.000
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		17.100.000.000		17.100.000.000
		Program Penyelenggaraan Jalan		31.522.000.000		31.522.000.000
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		250.000.000		
		DISPERKIM				
		Program Pengembangan Perumahan		4.285.000.000		4.285.000.000
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh		6.325.000.000		6.325.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		22.554.590.590		22.554.590.590
		DISHUB				

No	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		46.883.000.000		46.883.000.000
		Program Pengelolaan Pelayaran		290.000.000		290.000.000
		DISKOMINFO				
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik		2.025.400.000		2.025.400.000
		Program Aplikasi Informatika		4.202.300.000		4.202.300.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		50.000.000		50.000.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		50.000.000		50.000.000
5		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang				
		DLH				
		Program Pengelolaan Persampahan		49.500.574.500		49.500.574.500
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		2.000.000.000		2.000.000.000
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.500.000.000		1.500.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.600.000.000		1.600.000.000
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		52.000.000		52.000.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		79.000.000		79.000.000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		200.000.000		200.000.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		798.925.000		798.925.000
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		300.000.000		300.000.000
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		4.920.000.000		4.920.000.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		468.000.000		468.000.000
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		50.000.000		50.000.000
		DPPR				
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.660.000.000		1.660.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung		208.000.000		208.000.000
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		156.000.000		156.000.000
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		291.200.000		291.200.000
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		40.000.000		40.000.000
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		28.579.700.000		28.579.700.000
		Program Penyelenggaraan Jalan		5.000.000.000		5.000.000.000

No	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah (Rp)
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
6		Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik				
		SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		24.017.976.782		24.017.976.782
		Perekonomian Dan Pembangunan		2.623.596.500		2.623.596.500
		Program Administrasi Umum		27.174.244.000		27.174.244.000
		INSPEKTORAT KOTA				
		Program Penyelenggaraan Pengawasan		226.435.000		226.435.000
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		237.750.000		237.750.000
7		Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19				
		DPOP				-
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		2.795.000.000		2.795.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		8.454.428.000		8.454.428.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		6.100.000.000		6.100.000.000
		Program Pemasaran Pariwisata		2.580.000.000		2.580.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		480.000.000		480.000.000
		DINSOS				
		Program Rehabilitasi Sosial		1.188.859.688		1.188.859.688
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		1.546.940.000		1.546.940.000
		Program Pemberdayaan Sosial		753.000.000		753.000.000
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		169.075.000		169.075.000
		Program Penanganan Bencana		556.670.000		556.670.000

BAB III
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan secara terukur rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah :

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD dan *mapping* potensi pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional yaitu transaksi-transaksi *online* yang banyak dilakukan selama pandemi covid-19 terjadi;
- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan terutama regulasi pajak *online*,
- d. Menyusun strategi baru untuk pemungutan dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah seperti insentif dan disinsentif pajak;
- e. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis punggutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
- f. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- g. Membangun sinergisitas dan meningkatkan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan OPD penghasil;
- h. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat secara *online* sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- k. Melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi dan lain-lain;
- l. Melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas obyek pajak (uji petik);
- m. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun 2020 merupakan masa dengan pandemic Covid-19 yang berpengaruh pada ekonomi global yang berpengaruh pula pada ekonomi nasional dan daerah sehingga Pemerintah Daerah melakukan *Refocusing* Anggaran yang mengakibatkan Target Pendapatan Daerah pada tahun 2020 terkontraksi pada Rp 1.868.969.864.000,00 dan diproyeksi dapat pulih kembali pada tahun 2021 sebesar Rp 1.985.675.369.060,00.

Rekapitulasi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 dan 2021

NO	URAIAN (PP NO. 12/2019)	TARGET		
		2020		2021
		APBD Murni	APBD (Refocusing COVID)	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.534.920.104.400,00	1.868.969.864.000,00	1.985.675.369.060,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	715.000.000.000,00	389.468.885.000,00	606.369.800.800,00
	Pajak Daerah	515.294.428.600,00	257.647.214.300,00	442.690.000.000,00
	Retribusi Daerah	65.182.725.400,00	32.794.869.900,00	63.503.000.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.625.000.000,00	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.897.846.000,00	82.626.800.800,00	83.776.800.800,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.741.948.804.400,00	1.401.529.679.000,00	1.369.305.568.260,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.319.651.918.400,00	1.226.278.642.000,00	1.115.460.059.460,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.262.056.302.400,00	1.165.648.100.000,00	1.058.460.059.460,00
	Dana Transfer Umum	1.091.833.744.400,00	1.022.689.658.000,00	986.412.084.460,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	609.650.329.400,00	584.962.870.000,00	548.685.296.460,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	482.183.415.000,00	437.726.788.000,00	437.726.788.000,00
	Dana Transfer Khusus	170.222.558.000,00	142.958.442.000,00	72.047.975.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	57.595.616.000,00	60.630.542.000,00	57.000.000.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	422.296.886.000,00	175.251.037.000,00	253.845.508.800,00
	Pendapatan Bagi Hasil	317.306.886.000,00	122.756.037.000,00	253.845.508.800,00
	Bantuan Keuangan	104.990.000.000,00	52.495.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.971.300.000,00	77.971.300.000,00	10.000.000.000,00
	Pendapatan Hibah	77.971.300.000,00	77.971.300.000,00	10.000.000.000,00

Sumber : BPKD Kota Balikpapan

3.2. Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2021 disesuaikan dengan arah kebijakan nasional yaitu pemulihan ekonomi, reformasi sosial, dan pencegahan Covid-19 dengan tema pembangunan yaitu "Pemantapan Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) Daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Kota yang Berkelanjutan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” sesuai dengan kebijakan “money follow program”. Pemanfaatan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diarahkan pada tema pembangunan dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu pengelolaan belanja daerah didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk belanja pegawai tetap menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi yang terintegrasi dengan kinerja instansi pemerintah daerah (LKjIP). Proyeksi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal juga memperhatikan inflasi yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,88% (yoy) dan perkembangannya selama Covid-19.

Tabel 13. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	URAIAN (PP NO. 12/2019)	TARGET		
		2020		2021
		APBD Murni	APBD (Refocusing COVID)	
5	BELANJA DAERAH	2.700.695.088.325,00	2.182.801.582.088,00	2.057.993.678.390,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.019.342.311.876,00	1.724.658.698.419,00	1.715.079.028.269,00
	Belanja Pegawai	820.317.202.400,00	789.296.713.550,00	808.480.943.400,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.046.327.484.476,00	813.352.459.869,00	813.352.459.869,00
	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
	Belanja Hibah	148.452.000.000,00	118.763.900.000,00	89.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.245.625.000,00	3.245.625.000,00	3.245.625.000,00
5.2	BELANJA MODAL	665.052.776.449,00	302.001.303.424,38	326.614.650.121,00
	Belanja Modal Tanah	72.685.689.750,00	9.320.743.600,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.382.755.980,00	42.422.303.970,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.419.520.564,00	44.795.115.928,58	
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	370.069.235.530,00	182.170.436.200,80	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.454.246.425,00	22.807.225.525,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.041.328.200,00	485.478.200,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	154.841.580.244,62	15.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	154.841.580.244,62	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
	Transfer Bantuan Keuangan kepada Parpol	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00

Sumber : BPKD Kota Balikpapan

3.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 kebijakan pembangunan daerah Kota Balikpapan telah disusun menjadi prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kota Balikpapan yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional.

Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berupaya meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan.

2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

Perwujudan strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan optimalisasi regulasi bidang kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan kawasan industri dan kawasan pengembangan ekonomi. Program ini harus disinkronkan dengan renstra SKPD yang bertugas dan berwenang.

3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan sangat berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Strategi dalam percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ber dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan terpadu, percepatan penanganan PMKS dan pengendalian penduduk.

5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Masih adanya kesenjangan aksesibilitas dalam berbagai bidang mengakibatkan peran perempuan menjadi lemah dan berdampak kepada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun masyarakat. Selain itu masih ditemukan regulasi maupun kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan perempuan.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa belum ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender perlu diarahkan untuk mendorong adanya perubahan nilai-nilai yang ada dalam keluarga maupun masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya, tanpa kehilangan kodratnya sebagai wanita, untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu memperkuat peran keluarga dan mengedukasi masyarakat untuk ikut melindungi hak-hak anak diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup anak.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengarah pada perwujudan perlindungan perempuan dan anak, pembinaan kelembagaan organisasi perempuan, dan pembinaan potensi perempuan.

6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di daerah, saat ini Kota Balikpapan sebagai suatu daerah otonom sudah memiliki suatu Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dimana pelaksanaannya telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRW Kota Balikpapan telah mengalokasikan ruang dengan memperhitungkan kemampuan lahan dan keseimbangan lingkungan di Kota Balikpapan.

Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang di bertujuan untuk memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang; serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, hal yang penting untuk perlu dilaksanakan adalah menyiapkan dokumen rencana tata ruang, melaksanakan rencana tata ruang melalui program dan kegiatan serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perangkat peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan pemberlakuan sanksi.

Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang ditetapkan tanggal 2 November 2012 terdapat beberapa komitmen yang sangat mendukung pengembangan Kota Balikpapan menjadi “kota hijau”, antara lain:

1. Pola ruang 52% Kawasan Lindung dan 48% Kawasan Budidaya
2. Tidak menyediakan ruang untuk wilayah pertambangan
3. Pengembangan kawasan budidaya dengan konsep *foresting the city* dan *green corridor*, untuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau diarahkan pada *green industry* yang didukung *zero waste* dan *zero sediment*.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, penyediaan data dan informasi lingkungan menjadi hal yang penting guna mendorong pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, selain kondisi lingkungan dan ruang kota yang berkualitas, hal lainnya yang sangat penting adalah kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah bagian wilayah kota sebagai wadah hunian yang meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ini kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman merupakan persyaratan kelayakan lingkungan permukiman yang dapat menjadi indikator kekumuhan suatu kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan mitigasi bencana dan kebakaran, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang antara lain adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang dan membuat kota dan permukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;

Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan proses pembangunan. Kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki toleransi yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kota serta memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga adat istiadat dan budaya Indonesia. Tujuan dan sasaran pembangunan kota tidak akan tercapai tanpa partisipasi masyarakat.

Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kota dan kelembagaan terkait, membina dan menguatkan peran linmas dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan serta meningkatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan transportasi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan perekonomian serta pendukung pengembangan wilayah. Infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu melayani seluruh elemen masyarakat sehingga terwujudnya infrastruktur yang handal. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu menjawab permasalahan Kota Balikpapan yang ada akibat rendahnya kualitas infrastruktur seperti kemacetan dan banjir serta tingginya angka inflasi.

10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dimaksudkan untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan sumber daya manusia dan penerapan teknologi bagi pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana, mendorong UMKM yang mandiri, memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, dan Meningkatkan kualitas keamanan barang.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan nilai tambah produksi Industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri. Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan nilai tambah produksi industri dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya pelaku industri kecil menengah (IKM) dan revitalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Sedangkan implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM serta koperasi yang mandiri dilakukan melalui dua hal yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan koperasi serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi.

11. Pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dicapai melalui peningkatan promosi wisata, menjalin kerjasama dengan asosiasi pariwisata yang lebih beragam, mengembangkan sarana prasarana pendukung wisata, menerapkan regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, reformasi kebijakan peizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu, intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan Mengembangkan potensi sumber energi alternatif.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal adalah dengan pengembangan kawasan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan serta pengembangan energi baru terbarukan.

Implementasi terhadap arah kebijakan pengembangan kawasan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas dan informasi pariwisata, pengembangan potensi pariwisata, dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan percepatan pelayanan perizinan.

Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas dilakukan melalui percepatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan dan pengembangan energi baru terbarukan diupayakan melalui penghematan penggunaan energi fosil.

12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional;

Komponen strategi pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional meliputi :

- a. Peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pemetaan aset kota, peningkatan sistem manajemen pengelolaan asset;
- c. Peningkatan kelembagaan, regulasi, SDM, dan SARPRAS pelayanan publik dan pengintegrasian sistem manajemen di seluruh SKPD (pengembangan smart city);
- d. Penataan ulang pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja;
- e. Harmonisasi produk hukum daerah;
- f. Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan daerah dan SKPD.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan optimalisasi manajemen aset.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan serta peningkatan pengawasan internal. Sedangkan implementasi kebijakan optimalisasi manajemen aset dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan pengelolaan aset daerah.

Sehubungan dengan terbatasnya rencana alokasi Belanja Langsung untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di seluruh SKPD pada Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kota Balikpapan membagi penganggaran menjadi 3 kriteria yakni :

1. Anggaran Kegiatan Prioritas Rutin

Merupakan jenis penganggaran yang menitik beratkan pada kegiatan rutin SKPD yang tidak dapat dihindari seperti Belanja Operasional dan kegiatan rutin lainnya;

2. Anggaran Kegiatan Prioritas Non Rutin

Merupakan jenis penganggaran yang menitik beratkan pada kegiatan yang bersifat prioritas namun penganggarnya;

3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu fungsi penerimaan pembiayaan Daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Demikian KUA Kota Balikpapan Tahun 2021 ini sebagai dasar penyusunan dan pembahasan PPAS.

WALI KOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI